

## BAB V

### TANZIMAT : DAMPAK DARI SEBUAH PERUBAHAN

Penggunaan kata “tanzimat” sebagai nama dan periode tidak dicetuskan sejak awal pembaharuan ini dilaksanakan. Nama dan periode ini justru dikenal pada awal abad ke 20, menjelang keruntuhan kesultanan Turki Usmani. Periodisasi Tanzimat tidak didasarkan kepada masa kekuasaan Sultan yang berkuasa ataupun peraturan tertulis lainnya. Walaupun diawali bersamaan dengan pengangkatan Sultan Abdul Majid pada tahun 1839, periode Tanzimat tidak mengikuti akhir masa kekuasaan Sultan Abdul Majid, yang berakhir pada tahun 1861. Kekuasaan Sultan Abdul Aziz yang menggantikan posisi Sultan Abdul Majid pun, berakhir lima tahun sesudah berakhirnya masa Tanzimat (1876). Menurut Zurcher (2003:xviii), hal ini disebabkan periodisasi Tanzimat didasarkan pada aktivitas perubahan yang dilakukan pada masa tersebut.

Penggunaan istilah Tanzimat untuk periode pembaharuan 1839-1871, justru muncul dari sejarawan-sejarawan Turki pada awal abad ke 20, bukan dari tokoh-tokoh pembaharu pada masa Tanzimat seperti Mustafa Resit Pasha, Sultan Abdul Hamid, ataupun tokoh-tokoh pembaharu lainnya. Perkembangan kehidupan intelektual masyarakat Turki Usmani yang berkembang pesat sejak awal abad 20 merupakan faktor yang mendasari hal ini. Hingga saat skripsi ini ditulis, sejarawan-sejarawan yang mendalami tentang perjalanan sejarah Turki belum menemukan siapa yang pertama kali mencetuskan istilah Tanzimat bagi periode yang berlangsung sejak 1839 hingga 1871 ini.

Piagam Gulkhane, yang menjadi landasan bagi gerakan pembaharuan Tanzimat dianggap sebagai awal bagi masa Tanzimat. Sementara momen meninggalnya tokoh-tokoh pembaharu seperti Resit Pasha, dan terakhir Ali Pasha sebagai tokoh pada tahun 1871, dianggap merupakan akhir dari masa Tanzimat. Surutnya aktivitas pembaharuan selepas tokoh tersebut, menyebabkan sejarawan kontemporer cenderung menganggap masa pembaharuan Tanzimat berakhir pada tahun 1871 (Zurcher, 2003:57).

Gerakan pembaharuan yang berlangsung pada masa Tanzimat, merupakan usaha untuk melakukan modernisasi dan upaya untuk mencegah perpecahan dari sebuah kesultanan yang plural (Esposito, 2001:345). Pada masa Tanzimat, Kesultanan Turki Usmani merangkul sekaligus mengendalikan secara efektif wilayah-wilayah terluar Turki Usmani.

Aktivitas pembaharuan yang berlangsung selama masa Tanzimat, merupakan sebuah langkah baru bagi kesultanan Turki Usmani beserta seluruh lapisan masyarakatnya. Ketertinggalan atas beberapa negara Eropa, telah memaksa elit Turki Usmani untuk mulai memikirkan cara-cara untuk mengembalikan peran dan kedudukan Turki Usmani dalam dunia internasional, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer.

Masa Tanzimat merupakan sebuah masa reformasi yang merubah wujud kesultanan Turki Usmani menjadi lebih terbuka, modern, dan juga lebih sekuler. Selama upaya pembaharuan ini dilakukan, berbagai dampak dihasilkan oleh pembaharuan ini. Karena sifatnya yang benar-benar baru, serta merubah sistem yang telah diwariskan sejak lama, berbagai reaksi mewarnai proses pembaharuan

yang dilakukan selama masa Tanzimat. Tidak hanya dalam bidang politik, dampak ini terlihat dalam bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan juga kemiliteran. Bab ini akan membahas mengenai pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas pembaharuan yang dilakukan selama masa Tanzimat.

#### **A. Bidang Politik**

Kemunduran Turki Usmani selama dua abad sebelum Tanzimat, erat dikaitkan dengan lemahnya sultan-sultan yang berkuasa. Untuk mengantisipasi hal ini, diperlukan berbagai upaya perubahan. Sebagai indikator perubahan, dipilih langkah untuk mengadopsi sistem peradaban negara-negara Eropa. Upaya ini didukung penuh oleh sultan, yang memang menghendaki adanya perubahan baru. Berbagai ketertinggalan yang dialami oleh Turki Usmani atas Eropa, makin meningkatkan kepercayaan sultan kepada kemampuan sistem baru yang diadopsi dari negara-negara Eropa tersebut. Walaupun menjelang berakhirnya masa Tanzimat sultan termasuk golongan yang menentang perubahan, dukungan Sultan Abdul Majid (1839-61) dan Sultan Abdul Aziz (1861-76) merupakan faktor penting yang memungkinkan terjadinya masa Tanzimat.

Untuk melakukan perubahan, Sultan Abdul Majid memberikan kesempatan kepada tokoh-tokoh politik muda yang cenderung berhaluan modern dan memiliki hubungan yang erat dengan bangsa-bangsa Eropa. Tokoh-tokoh penting Tanzimat seperti Mustafa Resit Pasha, Ali Pasha, dan tokoh lainnya, adalah tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh ini merupakan cendekia baru yang dibesarkan dengan pendidikan Barat dengan kualifikasi yang dibutuhkan sultan. Meningkatnya interaksi dengan Eropa pada akhir abad delapan belas,

mendorong penguasa Turki Usmani saat itu Sultan Salim III (1789-1807), yang kemudian dilanjutkan Sultan Mahmud II (1807-1839), untuk mengirimkan beberapa cendekia muda guna mempelajari peradaban Eropa. Sebagian besar dari mereka ditugaskan untuk mempelajari teknologi kemiliteran dan sistem perekonomian yang dimiliki Eropa. Ketika masa Tanzimat berlangsung, golongan ini mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang mereka miliki.

Kepercayaan sultan kepada elit baru ini tidak hanya disebabkan latar belakang pendidikan mereka, ataupun kepercayaan terhadap sistem Barat saja. Kekecewaan sultan terhadap elit politik sebelumnya adalah faktor lain yang mendasari keputusan Sultan Abdul Majid untuk melangsungkan gerakan pembaruan. Berbagai aktivitas yang dilakukan elit *status quo*, telah banyak merugikan kesultanan, bahkan hingga menyebabkan upaya separatisme seperti yang dilakukan Muhammad Ali, gubernur Mesir pada awal abad sembilan belas. Sultan Abdul Majid merasa semakin terancam dengan keadaan ini, sehingga ia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada elit politik baru tersebut. Elit politik baru ini, kemudian dikenal dengan nama *memurs* (Shaw, 1977:71).

Pergantian posisi ini memunculkan reformasi kepegawaian dalam struktur pemerintahan Tanzimat, terutama di struktur pemerintahan pusat. Posisi-posisi penting dalam pemerintahan yang baru sebagian besar ditempati oleh kelompok *memurs*. Sebagian besar elit politik terdahulu, termasuk diantaranya beberapa gubernur, diberhentikan dari posisinya. Sisanya diintegrasikan dalam

pemerintahan baru, namun tetap berada dalam posisi yang tidak memiliki peranan penting dalam pemerintahan.

Reformasi kepegawaian ini dilakukan untuk memudahkan proses sentralisasi politik yang dilakukan elit politik Tanzimat. Sentralisasi ini ditujukan untuk mengembalikan kekuasaan dan kendali pemerintahan kepada pemerintah pusat, Aturan ini membuat penguasa daerah (gubernur) tidak lagi memiliki otoritas yang penuh dalam pengelolaan wilayahnya. Semula, penguasa daerah memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan secara mandiri dalam mengelola keuangan, perpajakan, bahkan dalam hal bidang kemiliteran. Tidak jarang dalam beberapa wilayah seperti Mesir, dan beberapa daerah Balkan, memiliki angkatan bersenjata yang mandiri, terpisah dari angkatan militer kesultanan Turki Usmani. Melalui program sentralisasi, segala urusan pemerintahan termasuk diantaranya masalah kemiliteran, diatur secara terpusat oleh elit politik yang baru.

Untuk mendukung upaya sentralisasi ini, golongan pembaharu juga menerapkan langkah lainnya. Dunia politik Turki Usmani kemudian dikenalkan pada sistem kementerian dan departemen, yang dipimpin oleh seorang perdana menteri (*grand vezir*). Masing-masing kementerian memiliki tugas yang berbeda, dengan tetap mengusung semangat perubahan. Selain untuk mengganti sistem politik yang lama, sistem kementerian ini ditujukan untuk memecahkan kekacauan birokrasi yang menjadi permasalahan Turki Usmani sejak abad ke tujuh belas. Tugas dan wewenang struktur pemerintahan diperjelas dan sistemis, sehingga diharapkan bisa merubah struktur birokrasi menjadi lebih teratur.

Kekacauan birokrasi yang dialami Turki Usmani disebabkan struktur sebelumnya tidak secara jelas mengatur fungsi dan wewenang pejabat pemerintahan ataupun militer, yang menyebabkan kontrol pemerintahan menjadi tidak terkendali.

Proses sentralisasi politik ini secara tidak langsung mulai membatasi kekuasaan sultan, karena pelaksanaan pemerintahan kini dikendalikan oleh kelompok pembaharu. Peran politik sultan hanya sebagai lambang politik, sehingga tidak terlibat secara aktif dalam pemerintahan. Sultan memang tetap berfungsi sebagai penentu kebijakan, tetapi dalam perancangan dan pelaksanaan kebijakan merupakan otoritas perdana menteri beserta jajarannya. Proses ini berkembang sejak awal munculnya gerakan pembaharuan, dan berlangsung sebagai sebuah perubahan yang alami. Proses ini terjadi karena sultan memang tidak memonitor langsung berbagai aktivitas perubahan yang dilakukan selama masa Tanzimat. Keyakinan yang tinggi terhadap dampak positif perubahan, dan tidak terbiasanya sultan untuk terlibat langsung dalam pemerintahan menyebabkan wewenang sepenuhnya berada dalam elit politik baru tersebut. Secara *de jure* kekuasaan memang dimiliki oleh sultan, namun secara *de facto* elit politik Tanzimat yang dipimpin adalah penguasa pada masa Tanzimat.

Perdana menteri (*grand vezire*) kini menjadi posisi yang berpengaruh, karena memiliki otoritas penuh untuk mengendalikan dan menjalankan pemerintahan. Selain perdana menteri, menteri luar negeri (*nezaret-i hariciye*) juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Gerakan pembaharuan yang mengadopsi sistem peradaban Eropa, menuntut interaksi yang intens antara

pemerintahan Turki Usmani dengan elit politik negara-negara Eropa. Menteri luar negeri bertugas untuk mengatur hubungan ini, termasuk mengatur sejumlah kesepakatan (perjanjian) antara pemerintahan Turki Usmani dengan negara-negara Eropa. Bidang yang disepakati tidak hanya menyangkut politik, tetapi juga menyangkut bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, serta kemiliteran. Di sebagian besar kesepakatan yang dihasilkan dengan negara-negara Eropa, peranan perdana menteri dan menteri luar negeri amat menentukan. Ketika pada tahun 1839 piagam Gulkhane dicetuskan, sultan hanya bertugas untuk menandatangani piagam tersebut. Isi piagam tersebut, sepenuhnya dicetuskan oleh Mustafa Ali Pasha sebagai perdana menteri saat itu. Begitu juga yang terjadi pada tahun 1856 ketika *Hatti-i Humayun* dicetuskan, ataupun pada perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan aktivitas pembaruan selama Tanzimat.

Dari sisi administrasi, upaya sentralisasi ini berhasil memberikan dampak positif. Selama berlangsungnya masa Tanzimat, sistem administrasi di pemerintahan Turki Usmani mengalami perbaikan bila dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pembentukan sistem provinsi yang baru juga memungkinkan kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, karena daerah-daerah dibagi dalam provinsi yang mendasarkan kepada populasi penduduk, bukan pada batas-batas geografis yang semula diterapkan (Lewis, 1968:38).

Ketika berhubungan dengan keadaan perpolitikan selama masa Tanzimat, kita akan menjumpai hal yang berbeda. Instabilitas politik merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan perjalanan panjang perpolitikan selama masa

Tanzimat. Menurut Shaw (1977:71), selama periode 1839 hingga 1876 posisi perdana menteri mengalami pergantian sebanyak 39 kali, sementara menteri luar negeri mengalami pergantian posisi sebanyak 33 kali. Antara kedua posisi tersebut, seringkali dijabat oleh orang yang sama, yang kadang menjabat lebih dari satu kali. Sejak pergantian Sultan Abdul Majid pada tahun 1861, kekuasaan eksekutif semakin tidak terkendali. Perdana menteri, begitu juga menteri luar negeri, mulai menunjukkan dominasi mereka atas kementerian lainnya. Pengangkatan menteri yang semula dilakukan oleh sultan, kini menjadi wewenang perdana menteri atau menteri luar negeri.

Seringnya pergantian posisi dalam kabinet, terutama posisi perdana menteri menunjukkan terdapatnya celah dalam sistem birokrasi yang coba dikembangkan oleh pemerintahan Tanzimat. Meskipun telah dibentuk badan legislasi (*Meclis-i Vala-yi Ahkam-i Adliye*), kontrol terhadap eksekutif (kabinet) tidak berjalan dengan baik. Di dalam sistem pemerintahan yang dikembangkan selama masa Tanzimat, badan *Meclis-i Vala-yi Ahkam-i Adliye* hanya bertugas untuk memberikan saran-saran bagi eksekutif. Badan ini tidak berwenang untuk melakukan pengawasan, ataupun teguran terhadap kinerja eksekutif. Anggota-anggota yang duduk dalam badan ini dipilih dan diangkat oleh perdana menteri, yang menyebabkan kedudukan badan legislasi ini berada dibawah kekuasaan eksekutif.

Munculnya pertentangan antara golongan tradisional dengan golongan pembaharu juga menyebabkan munculnya instabilitas politik ini. Golongan tradisional merupakan kelompok yang menentang proses perubahan yang



dilakukan selama masa Tanzimat. Kelompok ini terdiri dari elit politik terdahulu, ulama, serta kalangan militer tradisional seperti *janissary* dan *sipahis*. Golongan pembaharu terdiri dari orang-orang yang mendukung adanya perubahan, termasuk diantaranya golongan *memmurs*.

Pertentangan ini muncul sebagai reaksi atas perubahan yang terjadi selama masa Tanzimat. Kultur masyarakat Turki Usmani yang Islami, melalui masa Tanzimat dirubah menjadi kultur yang lebih sekuler, demokratis, dan liberal. Penggunaan sistem kebudayaan Barat yang bertolak belakang dengan kebudayaan Islam, menghasilkan sikap oposan kalangan tradisi untuk mempertahankan sistem budaya yang telah diwariskan sejak dinasti ini didirikan. Kalangan tradisional juga mengkhawatirkan atas keterlibatan negara-negara Eropa selama prose perubahan dilangsungkan. Mereka menganggap kesempatan ini akan dimanfaatkan oleh negara-negara Eropa untuk menguatkan pengaruh mereka atas Turki Usmani.

Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, mengingat keterlibatan negara-negara Eropa dalam upaya perubahan selama Tanzimat menunjukkan intervensi mereka atas pemerintahan Turki Usmani. Menurut Lenczowski (1993:12), aktivitas perubahan yang dilakukan selama masa Tanzimat banyak dipengaruhi oleh intervensi dari Inggris dan Rusia, baik dalam bidang politik, ekonomi, ataupun sosial. Keterlibatan dua negara ini banyak didasari oleh kedekatan tokoh-tokoh pembaharu dengan kedua negara tersebut.

Piagam Gulkhane yang merupakan dasar bagi perubahan yang dilakukan selama masa Tanzimat, merupakan langkah awal intervensi Eropa atas

pemerintahan Turki Usmani. Persamaan derajat antara penduduk muslim dengan non-muslim yang diatur piagam Gulkhane, merupakan bentuk intervensi awal dari Eropa terhadap kebijakan Turki Usmani tentang kependudukan.

Eropanisasi ini juga memaksa Turki Usmani untuk membuka pasar dagang mereka terhadap barang-barang Eropa, sekaligus menghilangkan sistem cukai terhadap komoditas Eropa. Langkah-langkah ini memang merupakan bagian dari bentuk kehidupan modern dan demokrat yang hendak dicapai Turki Usmani melalui Tanzimat. Persamaan derajat warga negara, perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada pasar, merupakan instrumen utama dari masyarakat liberal yang dimiliki negara-negara Eropa. Secara tidak sadar, melalui proses globalisasi tersebut kesultanan Turki Usmani mulai digiring menuju arah yang dikehendaki oleh negara-negara Eropa.

Perubahan-perubahan politik menghilangkan karakteristik Turki Usmani sebagai sebuah kesultanan. Sebagai akibatnya, sultan mulai kehilangan legitimasi politik baik dari elit politik lainnya ataupun dari masyarakat. Sebaliknya, peranan perdana menteri berikut menteri-menteri lain menjadi lebih kuat dibandingkan dengan sultan. Proses ini menyebabkan pada tahun 1871, Sultan Abdul Aziz menarik dukungan terhadap Tanzimat dan *memurs*. Kabinet *memmurs* yang terbentuk sejak 1839 dibekukan, dan kekuasaan diambil alih oleh Sultan Abdul Aziz. Pembekuan ini mengakhiri gerakan pembaharuan Tanzimat yang dimulai sejak tahun 1839.

Bagi masyarakat Turki Usmani, perubahan-perubahan politik yang dilakukan selama masa Tanzimat telah membentuk wawasan politik yang baru.

Pengenalan sistem pemerintahan kabinet, sistem hukum liberal, dan unsur-unsur lainnya telah merubah pola pikir sebagian besar masyarakat Turki Usmani tentang konsep kebangsaan ataupun kemasyarakatan.

Seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat Tanzimat yang semakin mengerti dinamika politik modern, memunculkan beragam reaksi atas upaya-upaya pembaharuan ini. Sebagian mendukung adanya perubahan, sementara sebagian lainnya merupakan penentang gerakan perubahan Tanzimat. Reaksi ini muncul karena Tanzimat merupakan gerakan revolusioner, dengan mengusahakan modernisasi, sekularisasi, sekaligus westernisasi terhadap masyarakat Turki Usmani.

Tanzimat dalam hubungannya dengan reaksi-reaksi yang kontra terhadap perubahan, melahirkan tiga bentuk kelompok masyarakat yang memandang perubahan secara kritis. Kelompok pertama adalah kelompok oposisi dari kalangan tradisionalis, termasuk diantaranya golongan ulama, elit politik pra Tanzimat, dan elit militer tradisional. Kelompok ini secara tegas menolak segala bentuk perubahan yang dilakukan selama berlangsungnya Tanzimat. Kelompok kedua adalah kelompok intelektual muda, yang memberikan kritik secara lebih halus. Sebagian besar kelompok ini pernah mengenyam sistem pendidikan modern, sehingga menguasai seluk beluk birokrasi dan berbagai ide-ide modern lainnya. Umumnya mereka melakukan pembentukan opini melalui media cetak, dengan tujuan untuk membangun masyarakat yang lebih kritis terhadap perubahan. Kelompok ketiga adalah kelompok yang berkeinginan untuk menghapuskan kedudukan sultan sebagai sebuah kekuatan politik. Kelompok

yang kedua setelah berakhirnya masa Tanzimat, kemudian membentuk sebuah organisasi baru yang bernama Turki Muda. Di kemudian hari, kelompok ini berperan besar dalam melahirkan Republik Turki modern.

Setelah masa Tanzimat berakhir, kekuasaan kembali dipegang oleh sultan. Sultan Abdul Aziz berusaha untuk mengembalikan keadaan pemerintahan seperti sebelum dilangsungkannya masa Tanzimat. Keinginan Sultan Abdul Aziz ini ditentang oleh golongan pembaharu, yang mendapatkan dukungan dari masyarakat Turki Usmani yang sudah semakin kritis. Akibatnya, semangat untuk mereformasi sistem kenegaraan makin meluas di kalangan masyarakat Turki Usmani. Beberapa daerah seperti di Balkan, Armenia, dan Yunani, mulai berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan Turki Usmani, yang dipengaruhi oleh kuatnya sentimen nasionalisme di masyarakat Turki Usmani saat itu.

## **B. Bidang Militer**

Di bidang militer, pembaharuan difokuskan kepada pembentukan sistem kemiliteran beserta angkatan bersenjata yang baru. Upaya ini ditempuh agar kekuatan militer Turki Usmani dapat direvitalisasi menjadi angkatan yang mampu bersaing dengan kekuatan Eropa.

Untuk melaksanakan tujuan ini elit politik Tanzimat melakukan langkah yang revolusioner, dengan merubah karakter masyarakat Turki Usmani menjadi lebih bersifat "sipil". Menurut Toprak (1999:29), masyarakat Turki Usmani sebelum masa Tanzimat merupakan memiliki sifat yang khas, yaitu agraris dan militeristik. Perubahan karakter ini terjadi pada abad ke 19, selepas modernisasi (Tanzimat) yang dialami kesultanan Turki Usmani.

Penghapusan institusi militer tradisional seperti *janissari* adalah sebuah kebijakan yang berdampak besar bagi masyarakat Turki Usmani saat itu. Institusi tradisional tersebut merupakan institusi yang telah diwariskan sejak awal dinasti Turki Usmani berdiri, sehingga telah mengakar dengan kuat dalam kebudayaan Turki Usmani. Ikatan ini menyebabkan institusi tersebut telah terintegrasi menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Turki Usmani itu sendiri.

Kondisi memunculkan aksi-aksi yang menentang dihapuskannya institusi militer tradisional. Sebagian besar anggota *janissary* saat itu melakukan perlawanan terhadap kebijakan tersebut. Aksi ini berujung kepada munculnya konflik fisik berkepanjangan, yang baru berakhir pada tahun 1839 ketika masa Tanzimat berlangsung.

Penggantian institusi militer tradisional dengan institusi militer yang baru memang bukan kebijakan yang dimulai sejak masa Tanzimat, melainkan dimulai sejak tahun 1808 ketika sultan Mahmud II berkuasa. Tetapi, semangat perubahan tersebut tetap diusung oleh elit politik Tanzimat yang juga merasakan dampak dari kebijakan tersebut. Sama seperti yang terjadi di dunia politik, pembentukan angkatan bersenjata baru menghasilkan sikap oposisi dari elit militer tradisional. Sikap ini juga menjadi salah satu penyebab dari instabilitas politik yang berkembang menjelang berakhirnya masa Tanzimat.

Sistem militer Tanzimat mereduksi fungsi sosial politik yang semula dimiliki kalangan militer. Sebelum masa Tanzimat, sistem pembayaran bagi anggota militer berupa pemberian hak pengelolaan tanah negara, ditambah dengan hak untuk mengambil pajak atas pengelolaan tanah tersebut. Ketentuan

ini berbanding lurus dengan tingkatan pangkat yang dimiliki, sehingga status (pangkat) dalam kemiliteran menentukan luas hak tanah yang diterima. Penguasaan atas tanah negara tersebut mendorong elit militer tumbuh menjadi kelas aristokrat yang baru, yang menghasilkan demoralisasi dan demiliterisasi kekuatan militer Turki Usmani.

Untuk memperbaiki kondisi ini, pada masa Tanzimat digantikan sistem hak tanah digantikan sistem penggajian, dan militer dilarang untuk memiliki profesi lain selain dalam bidang militer. Tanah yang semula dikelola oleh kalangan militer harus dikembalikan kepada negara. Hak untuk mengelola pajak juga dicabut, digantikan oleh badan pengumpul pajak baru yang bernama *muhassil*. Ketentuan inilah yang kemudian menyebabkan kalangan militer tradisional menentang pembentukan angkatan militer yang baru.

Institusi militer tradisional kemudian digantikan oleh angkatan bersenjata baru yang bernama *Asakir-i Nizamiye-i Sahane*. Selain masalah penggajian, angkatan perang yang baru ini juga mengawali era modernisasi teknologi persenjataan yang dimiliki oleh Turki Usmani. Modernisasi persenjataan baru tersebut terdiri dari senapan mesiu, artileri, serta taktik berperang yang lebih modern. Senjata-senjata berikut instruktur tersebut didatangkan sebagian besar dari Prusia (Jerman), sementara untuk angkatan laut pengembangan teknologi persenjataan disuplai dari Inggris.

Sekalipun telah mengurangi kuantitas angkatan militernya, jumlah angkatan militer yang dimiliki Turki Usmani selama masa Tanzimat tetap lebih besar bila dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya (Lewis, 1968:64). Sebagai

sebuah angkatan yang benar-benar baru, kebutuhan angkatan ini jelas membutuhkan persenjataan yang besar. Kebutuhan tersebut diimpor secara bertahap, dalam kuantitas yang besar.

Perubahan dalam sistem penggajian dan impor senjata secara besar-besaran, mempengaruhi kondisi keuangan kesultanan Turki Usmani. Besarnya anggaran yang digunakan untuk pembentukan angkatan perang baru, menyebabkan menipisnya kas kesultanan. Anggaran kemiliteran yang pada awalnya berusaha ditekan melalui penghapusan *janissary*, tidak mengalami perubahan yang berarti karena anggaran yang dikeluarkan untuk membeli persenjataan baru juga sangat besar. Permasalahan tersebut kemudian ditanggulangi elit politik masa Tanzimat melalui peminjaman modal kepada negara-negara Eropa, ataupun berupa kesepakatan pembelian senjata secara kredit.

Pada tahun 1853-1856, kesultanan Turki Usmani terlibat perang Krim (Crimea) yang menjadi tempat pengujian angkatan perang baru tersebut. Perang ini memang tidak melibatkan Turki Usmani secara langsung, namun menumbuhkan kesadaran bahwa tentara Turki Usmani belum menguasai persenjataan baru tersebut secara optimal. Untuk menguasai teknologi peralatan perang tersebut, didatangkan instruktur-instruktur dari negara-negara Eropa berikut kurikulum sistem pendidikan militer yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan institusi pendidikan modern pertama adalah sekolah militer, yang bernama *Mekteb-i Mulkiye* (Akademi Pegawai Sipil). Akademi ini didirikan pada tahun 1859, namun siswanya terbatas hanya untuk elit-elit militer dan pegawai pemerintahan pusat.

Selepas *Mekteb-i Mulkiye*, berkembang akademi-akademi militer lainnya, yang berada di bawah naungan departemen pertahanan (*bab-i serasker*). Pembentukan institusi pendidikan modern ini bertujuan untuk membentuk angkatan bersenjata baru yang lebih modern dan universal, tidak terbatas pada suku ataupun agama tertentu. Modernisasi ini, kemudian menghilangkan unsur-unsur tradisional seperti agama, ataupun kesukuan, dalam kurikulum akademi kemiliteran yang dikembangkan selama masa Tanzimat. Prajurit diarahkan untuk setia kepada sultan dan pemerintahan, bukan kepada agama ataupun suku bangsa mereka.

Kurikulum pendidikan kemiliteran ini membuat militansi kemiliteran yang berlandaskan hukum *syariah* menjadi hilang. Konsep *jihad* yang mendorong prajurit untuk membela negara sebagai bagian dari ibadah, tidak lagi digunakan pada angkatan militer baru tersebut. Penggunaan sistem penggajian merupakan upaya elit politik Turki Usmani untuk membentuk sikap profesionalisme dalam diri prajurit-prajurit Turki Usmani. Warga juga dibebaskan dari wajib militer asalkan membayar pajak *bedel-i askeri*, sebagai pengganti keberadaan mereka dalam kemiliteran. Keadaan ini menyebabkan militansi yang dimiliki oleh kekuatan militer yang baru menjadi berkurang, karena tentara baru tersebut cenderung untuk mengedepankan persoalan untung rugi daripada konsep *jihad*.

Pengembangan kekuatan militer Turki Usmani juga tidak didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai. Selama masa Tanzimat, hampir seluruh persenjataan kemiliteran Turki Usmani disuplai dari negara-negara Eropa. Pembelian senjata secara kredit menghasilkan hutang yang menumpuk,



yang diperparah dengan minimnya pengembangan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut tanpa disadari telah menimbulkan ketergantungan Turki Usmani pada Eropa, baik dalam bidang militer, ekonomi, ataupun politik. Pengaruh Eropa atas Turki Usmani menjadi semakin kuat, sehingga Eropa makin berani untuk melakukan intervensi terhadap pemerintahan Turki Usmani. Daya tawar yang dimiliki Turki Usmani pun semakin rendah. Dalam beberapa perjanjian yang dilakukan dengan Inggris, Rusia, ataupun Austria, pihak Turki Usmani selalu berada dalam pihak yang dirugikan.

Dibalik segala keterbatasan infrastruktur, pembentukan sistem administrasi yang baru berhasil memecahkan masalah demoralisasi ataupun demiliterisasi yang dialami sejak abad ke 17. Melalui kontrol kemiliteran yang dilakukan secara terpusat, kendali atas kemiliteran kembali berada di tangan pemerintahan pusat. Berbagai penyimpangan yang dilakukan institusi militer tradisional berhasil ditekan, sehingga tingkat korupsi di kalangan militer mengalami penurunan (Shaw, 1977:86).

Sistem perpajakan yang menjadi “ladang korupsi” institusi militer tradisional, melalui sistem *muhassil* berhasil dikembangkan menjadi sebuah sistem yang relatif sehat. Pengumpulan pajak secara terpusat dan independen memungkinkan alur pajak menjadi lebih ringkas dan teratur.

Hingga berakhirnya masa Tanzimat, upaya membentuk sebuah kekuatan militer yang setara dengan negara-negara Eropa belum mencapai hasil yang memuaskan. Selain masalah sumber daya manusia, instabilitas perpolitikan dan perekonomian Turki Usmani berpengaruh besar terhadap tidak maksimalnya

kinerja pembaharuan dalam bidang militer. Perbaikan sistem perpajakan tidak ditunjang oleh pengembangan unit ekonomi yang lainnya, sehingga keuangan Turki Usmani selama masa Tanzimat selalu berada dalam keadaan defisit.

### **C. Transformasi Budaya**

Piagam Gulkhane (Deklarasi Gulkhane) yang dicetuskan pada tanggal 3 Nopember 1839, merupakan tonggak baru yang memungkinkan berbagai macam perubahan berlangsung selama masa Tanzimat. Piagam ini sekaligus berfungsi sebagai landasan hukum bagi gerakan-gerakan pembaruan yang muncul.

Deklarasi ini dimaksudkan untuk melakukan reorganisasi secara struktural dan komprehensif atas rezim lama. Deklarasi tersebut memiliki dua tujuan yang bersamaan, pertama untuk memenuhi keinginan kekuatan-kekuatan bangsa Eropa dan kedua untuk menumbuhkan rasa percaya diri pemerintahan dalam negeri. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukanlah berbagai perubahan di bidang politik, militer, pendidikan, dan ekonomi.

Pembaharuan yang dilakukan selama masa Tanzimat memiliki keterkaitan yang erat dengan negara-negara Eropa. Tanzimat merupakan sebuah gerakan transformasi yang semula berorientasi kepada alih teknologi kemiiteran Eropa, meluas dalam bidang-bidang lain seiring dengan meningkatnya interaksi Eropa dan Turki Usmani. Lambat laun, proses ini mengarahkan masyarakat dan kebudayaan Turki Usmani menuju sebuah kebudayaan baru, yang berbeda dari kebudayaan Turki Usmani selama ini. Piagam Gulkhane pun, menurut Shaw (1977:60) diinspirasi oleh lahirnya revolusi Perancis.

Sebelum mengenal gerakan pembaharuan, masyarakat Turki Usmani menganut sistem tradisional, dengan kultur keislaman yang begitu kental. Karakteristik ini menyebabkan perjalanan panjang kesultanan Turki Usmani dianggap sebagai salah satu peradaban terbaik yang pernah dimiliki dunia Islam. Kesultanan Turki Usmani pada masa kejayaannya telah menandai puncak kekuasaan dan perkembangan tertinggi dalam sistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi umat dalam perkembangan sejarah masyarakat Islam (Esposito, 1984:131).

Pertemuan dua unsur yang benar-benar berbeda ini menunculkan permasalahan baru. Proses adaptasi antara unsur baru yang direpresentasikan oleh sistem baru yang berasal dari Eropa, tidak berlangsung dengan baik. Sistem tradisional Turki Usmani yang terbentuk sejak abad ke 14, dan berhasil diwariskan hingga masa Tanzimat, telah mengakar kuat di sebagian besar masyarakat Turki Usmani, termasuk elit-elit dalam dunia politik dan militer.

Proses ini menyebabkan masyarakat Turki Usmani mengalami krisis identitas, antara mempertahankan sistem tradisional dengan menerima sistem kebudayaan modern Eropa. Selama 42 tahun Tanzimat berlangsung, perubahan-perubahan yang ada mencerminkan hal ini. Sekularisasi dan westernisasi merupakan dampak yang muncul dari adanya aktivitas pembaharuan selama masa Tanzimat. Berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, militer, pendidikan, bahkan juga keagamaan, turut mengalami proses sekularisasi.

Persamaan hak dan kewajiban yang diusung Tanzimat, merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat muslim Turki Usmani. Sekalipun mereka telah

terbiasa dengan kehidupan plural semenjak berdirinya dinasti ini, status mereka dengan warga non-muslim memiliki perbedaan dalam bidang tertentu, misalnya politik ataupun ekonomi. Status yang disandang warga non-muslim berada di bawah status warga muslim, sehingga hak dan kewajiban yang mereka dapatkan juga berbeda dengan warga umumnya. Ketika sistem yang telah diwariskan sejak lama ini mengalami perubahan, muncul kegoncangan dalam tatanan yang ada.

Struktur masyarakat pun berubah. Ulama yang semula berperan besar dalam hal-hal keagamaan dan juga pemerintahan menjadi tereduksi dalam sistem masyarakat pada masa Tanzimat. Peranan ulama yang semula mendapatkan peranan khusus atas fungsinya dalam politik dan keagamaan, menjadi hanya difungsikan sebagai tokoh keagamaan saja. Sultan yang semula juga berperan sebagai pemimpin keagamaan tertinggi (khalifah), juga mengalami hal yang sama. Sultan hanya diposisikan sebagai kepala pemerintahan, sementara urusan keagamaan diatur oleh *seyhulislam* (menteri agama).

Pemisahan antara ilmu pengetahuan dan agama dalam dunia pendidikan, menyebabkan masyarakat Turki Usmani diarahkan menuju sebuah masyarakat yang lebih sekuler. Motif sekularisasi ini terlihat dengan adanya pemisahan antara sekolah umum dengan sekolah agama. Sekolah umum memiliki kurikulum yang diadopsi dari sistem pendidikan Barat, sementara sekolah agama mengacu kepada sistem pendidikan yang didasarkan pada sistem syariah. Pemisahan ini menyebabkan kurikulum pendidikan menjadi terbagai dua, yaitu kurikulum untuk sekolah agama dan kurikulum untuk sekolah sekuler.

Akibatnya, pelajaran agama kemudian dihapuskan dari sistem pendidikan umum.

Perubahan ini menyebabkan budaya masyarakat Turki Usmani yang semula kental dengan ikatan kesukuan dan sistem Islam, berubah menjadi masyarakat yang lebih demokrat dan liberal. Perubahan ini membuat masyarakat Turki Usmani menjadi semakin kritis terhadap perubahan. Pembentukan Republik Turki pada 1923, merupakan puncak dari perubahan ini.

